



Upaya Women Migrant Workers Filipina dalam Realisasi Agenda SDG 8 Periode 2017-2019

Gibran Fakhrishan¹, Nurmasari Situmeang², Sindy Yulia Putri³

¹ Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

^{2,3} Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta

Abstract

Received: 14 Juli 2022

Revised: 17 Juli 2022

Accepted: 20 Juli 2022

This study aims to describe how the efforts of Women Migrant Workers in helping to alleviate poverty are reviewed through SDG 8 as an indicator of the success of the government's reciprocal relationship regarding the rights and protections that they have and should get during the 2017-2019 period. To discuss this problem, the researcher uses a framework of thought through feminism theory of international political economy, migration theory, compliance theory, and also the concept of non-state actor. The results of this study indicate that Women Migrant Workers have succeeded in sending 19.2% of the total remittances during that period. However, their rights and protection have not been addressed through a review of SDG 8. For internal factors, SDG 8 cannot fulfill its objectives optimally because its position is not stronger than national law. Then externally, WMWs recipient countries have their own regulations in handling the migration process, so that gender-sensitive migration conditions have not been realized.

Keywords: Women Migrant Workers, Philippines, Poverty, SDG 8, Rights and Protections

(*) Corresponding Author: gibranfakhrishan311@gmail.com

How to Cite: Fakhrishan, G., Situmeang, N., & Putri, S. (2022). The Efforts of Philippine Women Migrant Workers in the Realization of the SDG 8 Agenda for the 2017-2019 Period. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(12), 101-116. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6943542>

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang turut serta dalam peristiwa kolonialisasi, Filipina merupakan salah satu negara yang menyerap banyak aspek globalisasi dalam membenahi negaranya pasca-kolonialisasi, terutama terkait dengan kondisi ekonomi dan sosial negara tersebut, terdapat banyak guncangan yang membuat Filipina membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit dari keterpurukan pasca-kolonialisasi. Salah satu pembuktiannya ialah kemiskinan dan ketidaksetaraan telah menjadi tantangan berulang di Filipina dan muncul kembali setelah krisis keuangan global saat ini dan kenaikan harga pangan, bahan bakar, dan komoditas yang dialami pada tahun 2008.

Menurut David Brady, dalam kasus Filipina, kemiskinan adalah konsekuensi dari kegagalan masyarakat untuk secara kolektif mengambil tanggung jawab untuk memastikan keamanan ekonomi warganya (Thompson & Batalla, 2018). Hambatan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih cepat, termasuk pola pertumbuhan yang kurang berpihak pada masyarakat miskin; ketimpangan pendapatan dan kesempatan yang tinggi; serta dampak buruk dari bencana alam dan konflik.



Sementara itu, tingkat pengangguran diperkirakan sebesar 5,7% pada tahun 2017, yang merupakan salah satu tingkat terendah yang tercatat sejak tahun 2005. Namun, meskipun terdapat tren penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, setengah pengangguran tetap tinggi, yang diperkirakan sebesar 16,1% pada tahun 2017 (Reyes, et al., 2019). Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran pria dan wanita masing-masing berada pada 5,4 dan 5,1 persen (United Nations, 2019). Terlihat bahwa terdapat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi tingkat setengah pengangguran di negara ini.

Hal tersebut disebabkan karena Filipina memiliki tingkat melek huruf yang tinggi, kecakapan berbahasa Inggris yang tersebar luas, serta tenaga kerja terdidik, yang membuat orang Filipina sangat kompetitif di luar negeri. Hal itu menghasilkan 988.615 orang Filipina yang dikerahkan untuk bekerja di luar negeri di lebih dari 180 negara pada tahun 2005 (Nadeau, 2008). Ekspor tenaga kerja Filipina berjenis kelamin perempuan Filipina di luar negeri sangat terkonsentrasi pada pekerjaan tidak terampil dan pekerjaan jasa, seperti buruh dan pekerja rumah tangga.

Pada tahun 2014 saja, OFWs mengirim kembali 173,2 miliar peso (atau sekitar US\$4 miliar). Memang, pengiriman uang Filipina telah diamati lebih stabil daripada aliran keuangan lainnya di negara itu sejak tahun 1996, dan telah melampaui investasi langsung asing (FDI) dan bantuan pembangunan resmi (ODA) (Tanyag, 2017). Di tahun yang sama, para perempuan ini mengirim kembali 24,3 miliar peso atau 19,2 persen dari total pengiriman uang ke negara tersebut.

Walaupun begitu, kesetaraan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) terus-menerus lebih rendah daripada TPAK laki-laki, dengan selisih 28%-32% sejak tahun 1998 meskipun lapangan kerja perempuan meningkat dari tahun ke tahun (Hega, Alporha, & Evangelista, 2017, p. 10). Karena permintaan yang lebih tinggi, perempuan migran terkonsentrasi di pekerjaan rumah tangga dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa perempuan menyumbang 73,4% dari semua pekerja rumah tangga migran di seluruh dunia.

Pekerja migran juga mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di masa lalu. Filipina di tingkat mikro menghasilkan remitansi yang tidak hanya dapat mengubah tingkat kehidupan sehari-hari anggota keluarga, tetapi mengubah posisi status mereka di kota atau desa setempat. Dan pada tingkat makro, mereka tidak hanya sangat meningkatkan GNP melalui remitansi tersebut, tetapi juga mempengaruhi pandangan tentang jenis citra yang dimiliki orang Filipina di luar negeri.

Namun, pemerintah dirasa belum memenuhi hubungan timbal balik yang diberikan dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan kepada *Women Migrant Workers* (WMWs). Secara internal, WMWs masih mendapatkan stigma yang buruk sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab, dan di sisi lain ibu migran harus masih memikul peran ganda dalam menjalankan rumah tangga dan bekerja di luar negeri, karena norma di Filipina yang menganggap bahwa perempuan merupakan simbol kepatuhan nasional. Akan tetapi, hal tersebut kontradiktif dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat kalangan bawah, yang memiliki kesejahteraan yang sangat terbatas, sehingga dengan terpaksa seorang ibu di Filipina harus bekerja di luar negeri dan jauh dari keluarga mereka.

Sedangkan secara eksternal, masih banyak kesenjangan informasi, kekerasan, serta ketidakadilan upah yang diterima oleh WMWs dalam bekerja di luar negeri. Walaupun secara teoretis Filipina merupakan salah satu negara dengan UU migrasi terbanyak dan negara yang rajin dalam pelaksanaan ratifikasi konvensi internasional, pemerintah belum memberikan solusi yang berpihak kepada WMWs secara praktis. Oleh sebab itu, peneliti akan membahas lebih lanjut fenomena ini ditinjau dari lensa SDG 8, terutama dalam poin 8.5 mengenai pemerataan upah dan 8.8 mengenai perlindungan migrasi dalam upaya realisasinya.

Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dengan menggunakan klusterisasi sesuai dengan pembagian topiknya, seperti topik gender, topik, kemiskinan, dan topik migrasi. Di dalam topik gender lebih menjelaskan mengenai dinamika feminisme di Filipina serta UU yang relevan terhadap masalah tersebut (Pacoy, 2013; Tigno, 2014; Cortes, 2015; Encinas-Franco J., 2016). Untuk topik kemiskinan, lebih menjelaskan mengenai indikator kemajuan pemberdayaan perempuan yang turut meningkatkan kestabilan ekonomi Filipina (Mohyuddin, 2017; Bradshaw, Chant, & Linneker, 2017; San Juan & Agustin, 2019). Dan untuk topik migrasi, lebih menjelaskan mengenai reproduksi sosial dan stigma yang diterima perempuan migran yang bekerja di luar negeri (Tanyag, 2017; Gammage & Stevanovic, 2018; Encinas-Franco J., 2020).

Oleh sebab itu, melihat latar belakang dan *literature review* yang sudah peneliti olah, yang membedakan penelitian kali ini dengan sebelumnya adalah, bahwa penelitian kali ini peneliti mempunyai dua fokus utama, yaitu melihat sejauh mana realisasi yang dilakukan WMWs Filipina dalam memberikan kontribusi berupa remitansi selama tiga periode yang peneliti batasi, yaitu 2017-2019. Dan juga fokus kedua ialah melihat fenomena ini menggunakan lensa SDG 8 untuk memperkuat hak dan perlindungan apa saja yang sudah dan seharusnya diterima oleh WMWs selama bekerja di luar negeri.

Signifikansi dari penelitian ini ialah mendeskripsikan bagaimana upaya yang diberikan WMWs Filipina selama periode yang dipilih sesuai, terutama dalam teori feminisme pasar (neoliberalisasi feminisme) dan interseksionalitas. Kemudian teori migrasi juga peneliti gunakan sebagai wadah dalam membahas fenomena ini, melalui aspek fungsionalis dan teori migrasi baru, di mana aspek utama migrasi adalah keluarga. *Compliance theory* juga digunakan sebagai jembatan antara kedua teori sebelumnya, apakah WMWs bersikap patuh atas dasar kelayakan atau pemikiran yang rasional. Dan terakhir, konsep *non-state actor* digunakan sebagai representasi WMWs dalam menjelaskan konsep pluralisme dalam bentuk sekumpulan individu.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam kesempatan kali ini, peneliti menentukan bahwa objek penelitian yang akan dikaji adalah *Women Migrant Workers* (WMWs) dalam membantu pengentasan kemiskinan yang ada di Filipina, yang diposisikan sebagai *non-state actors* sekumpulan individu. Penelitian ini juga difokuskan dengan meninjau melalui SDG 8 terkait pemerataan hak-hak buruh, termasuk WMWs. Hal-hal yang dikaji untuk diperjuangkan ialah hubungan timbal balik pemerintah mengenai pemerataan upah WMWs dan juga perlindungan hak-hak mereka sebagai pekerja, pada periode 2017-2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan teknik penelitian yang sifatnya intuitif dan sistematis untuk menghasilkan penelitian yang efisien dan koheren melalui penjabaran yang kompleks. Empat fokus penelitian kualitatif (Bryman & Bell, 2019), yaitu kredibilitas; transferabilitas; ketergantungan; dan; konfirmabilitas.

Dalam penelitian kali ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sebagai data campuran (primer dan sekunder) dan wawancara mendalam (*in-depth*) sebagai data primer. Studi pustaka sendiri merupakan cara pengumpulan dalam berbagai bentuk kepastakaan seperti, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi terkait, dan juga artikel baik fisik maupun elektronik. Selain itu, untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti turut menggunakan teknik wawancara kepada pihak yang memang terkait dengan isu ini.

Untuk studi pustaka sendiri, peneliti secara khusus membagi ke dalam dua bentuk metode, yakni *literature review* dan *internet based research*. Sedangkan untuk proses wawancara, peneliti menjadikan dua informan, yaitu Mr. Bryan Lou (Kedubes Filipina di Jakarta) sebagai informan utama melalui via *email*, sedangkan untuk informan pendukung, peneliti mewawancarai Ibu Anis Hidayah selaku pendiri *Migrant CARE* Indonesia yang merupakan salah satu NGO yang bergerak pada bidang kemigrasian. Dan untuk teknik analisis data yang peneliti gunakan, dibagi menjadi tiga tahap menurut, yaitu (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) *Data Reduction* (proses penyederhanaan data); *Data Display* (pengkajian sesuai data lapangan); dan *Verification & Conclusion* (penyimpulan dengan menguji validitas data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Women Migrant Workers dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan di Filipina

WMWs telah berubah dengan adanya feminisasi migrasi dan pergeseran rezim tata kelola migrasi tenaga kerja. Representasi populer dari WMWs adalah sebagai pahlawan negara. Sebagian besar terkait dengan perempuan yang terlibat dalam pekerjaan perawatan, wacana global mewakili upaya heroik WMWs, dengan fokus pada manfaat pengiriman uang dan kontribusi positif dari pekerjaan perawatan di negara tujuan (UN WOMEN (c), 2017). Lebih jauh, representasi pahlawan sangat erat kaitannya dengan wacana pekerja yang rela berkorban. Keterwakilan ini memiliki efek koersif, sehingga pekerja migran akan cenderung tidak menentang kondisi kerja dan menuntut hak-hak mereka, hal ini juga meningkatkan kerentanan WMWs terhadap eksploitasi.

Namun, pekerjaan sektor informal tetap menjadi ciri yang menonjol dari pasar tenaga kerja Filipina, dan yang lebih menonjol bagi perempuan daripada laki-laki. Pekerjaan sektor informal ditandai dengan kurangnya perlindungan sosial, upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Pada tahun 2000, hampir separuh pekerja laki-laki dan perempuan bekerja di sektor informal. Angka ini turun menjadi 40 persen untuk perempuan dan 36 persen untuk laki-laki pada tahun 2017 (Cabegin & Gaddi, 2019, p. 3). Sesuai dengan data yang diberikan oleh Kedubes Filipina di Jakarta, berikut beberapa data yang menjelaskan terkait migrasi perempuan.

Table 1: Distribusi OFWs berdasarkan Gender 2017-2019

Penjelasan	2017	2018	2019
Jumlah Pekerja Migran Filipina ('000)	2,339	2,299	2,202
Profil Gender (%)	100.0	100.0	100.0
Laki-laki	46.3	44.2	44.0
Perempuan	53.7	55.8	56.0

Sumber: (PSA, 2021)

Table 1 menjelaskan bahwa, jika kesempatan memang dibuka untuk perempuan dalam dunia pekerjaan, ambisi perempuan untuk bekerja di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, karena WMWs yang bekerja di luar negeri memiliki motivasi ekonomi yang sedikit lebih kuat, dikarenakan mereka merasa bertanggung jawab untuk anak-anak dan keluarga mereka untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Table 2: Total Remitansi dari OFWs 2017-2019

Penjelasan	2017	2018	2019
Total Remitansi (dalam Miliar Peso)	205.1	235.8	211.9
Berdasarkan Tipe Remitansi			
<i>Cash Sent</i>	146.8	169.4	157.9
<i>Cash Brought Home</i>	48.2	55.2	46.7
<i>In Kind</i>	10.1	11.2	7.3
Berdasarkan Sifat Pekerjaan (<i>Cash Sent</i>)			
<i>Managers</i>	NA	2.6	1.0
<i>Professionals</i>	NA	19.5	18.6
<i>Technicians and associate professionals</i>	NA	19.1	24.0
<i>Clerical support workers</i>	NA	6.9	4.8
<i>Service and sales workers</i>	NA	27.2	24.5
<i>Skilled agricultural forestry and fishery workers</i>	NA	0.10	1.1
<i>Craft and related trade Workers</i>	NA	21.6	16.9
<i>Plant and machine operators and assemblers</i>	NA	31.3	24.1
<i>Elementary occupations</i>	NA	41.1	42.8

Sumber: (PSA, 2021)

Analisis table di atas menjelaskan bahwa, OFWs pada pekerjaan dasar mencatat remitansi gabungan sebesar P42,8 miliar, di mana pekerjaan tersebut didominasi oleh WMWs dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Diikuti oleh mereka yang bergerak di bidang jasa dan penjualan sebesar P24,5 miliar;

operasi pabrik dan mesin sebesar P24,1 miliar; teknisi dan profesional asosiasi di P24,0 miliar; dan profesional di P18,6 miliar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa feminisme pasar benar-benar diterapkan pada periode ini, di mana migrasi WMWs ke luar negeri sebagian besar bersifat reguler dan sukarela. Mereka sudah diberikan kesempatan dan akses untuk bekerja di luar negeri, walaupun jenis pekerjaannya masih terbatas. Per Desember 2019, Departemen Luar Negeri (DFA) mencatat 10.376.773 orang Filipina di luar negeri, di mana 62,8 persen adalah migran berdokumen atau permanen, 29,6 persen berdokumen atau migran sementara, dan 7,4 persen adalah migran tidak berdokumen atau ireguler (NEDA PH, 2020, pp. 1-14).

Pengiriman uang ke Filipina mencapai rekor tertinggi sebesar US\$35,2 miliar pada tahun 2019, dengan menyumbang hampir 10% dari produk domestik bruto (PDB) dan memperkuat negara itu sebagai penerima pengiriman uang terbesar keempat di dunia (World Bank, 2020). Prioritas ekonomi berorientasi ekspor ini juga terlihat dari cara pemerintah terus memasarkan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Pengiriman uang yang dihasilkan dari pekerjaan di luar negeri telah menjadi ciri khas pembangunan ekonomi Filipina (Henderson, 2022, p. 50).

Dalam upayanya, dapat dikatakan bahwa WMWs yang semakin mengisi ceruk dalam memperluas sektor pasar tenaga kerja yang kurang penduduk, dan berkontribusi pada fleksibilitas pasar tenaga kerja, meningkatkan populasi usia kerja dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan sumber daya manusia (Hennebry, Holliday, & Moniruzzaman, 2017). WMWs juga berkontribusi pada basis pajak dan program sosial yang dihasilkan.

Di tingkat nasional, WMWs dengan remitansinya berperan dalam memfasilitasi akses ke layanan sektor keuangan formal, mempromosikan inklusi keuangan yang terpinggirkan dan mempromosikan pembangunan keuangan untuk masyarakat domestik Filipina. WMWs dari Filipina juga memberikan upaya dalam mengirimkan *Kotak Balikbayan* (Hennebry, Holliday, & Moniruzzaman, 2017). Kotak-kotak ini sering berisi kebutuhan pokok untuk anggota keluarga dan tanggungan yang tinggal di Filipina. Pengiriman barang memberikan alternatif menarik untuk mengontrol bagaimana sumber daya dibelanjakan, terutama untuk anak-anak yang mereka tinggalkan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sumption & Flamm (2012) mengenai teori migrasi fungsionalis dan NELM (Agu, Orji, & Onodugo, 2017). Pada tingkat makro, dari perspektif fungsionalis, keputusan pengoptimalan individu diharapkan berkontribusi pada alokasi faktor-faktor produksi yang lebih optimal, terutama melalui transfer tenaga kerja dari daerah dan negara miskin ke kaya dan arus balik modal dari daerah kaya ke miskin, yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah asal dan daerah tujuan. Model fungsionalis ini semuanya didasarkan pada asumsi eksplisit atau implisit bahwa seseorang membuat keputusan rasional untuk memaksimalkan pendapatan atau utilitas yang ada.

Kemudian, untuk NELM sendiri, menyatakan bahwa migrasi terjadi dalam konteks kemiskinan ialah karena keluarga, bukan lagi karena aspek individu, dengan melanjutkan bahwa rumah tangga adalah aktor rasional yang terlibat dalam strategi migrasi. Pada dasarnya, mereka menafsirkan migrasi sebagai strategi pengoptimalan, di mana individu dan keluarga menggunakan migrasi untuk

mengakses sumber pendapatan yang lebih tinggi dan lebih aman, serta peluang mata pencaharian lainnya.

Selain meningkatkan angkatan kerja lokal, pekerja migran umumnya lebih banyak menyumbang pajak dan kontribusi sosial daripada yang mereka terima. Pekerja migran juga membawa sumber daya manusia, melengkapi stok pengetahuan dan keterampilan tanpa merugikan negara tujuan dalam hal investasi pendidikan dan pembangunan manusia. Migrasi perawat dari Filipina, misalnya, menjawab permintaan akan tenaga ahli medis yang terampil di negara tujuan. Dengan mendatangkan perawat dari Filipina, negara tujuan memperoleh keterampilan penting tanpa investasi sebelumnya dalam sumber daya manusia para migran ini (UN WOMEN (a), 2017).

Meneliti kerangka normatif dan komitmen, seperti SDGs, dari perspektif gender adalah langkah pertama yang berharga menuju implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif gender yang mendukung migrasi untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan *compliance theory*, kategori yang paling relevan dari teori kepatuhan WMWs adalah keuntungan. Keuntungan bergantung pada motivasi untuk melestarikan atau meningkatkan sumber daya seseorang. Dalam fenomena migran perempuan seperti ini, pada awalnya kepatuhan terbentuk melalui rasa kelayakan (*appropriateness*), namun berkat kesetaraan gender yang sudah berkembang, rasa kepatuhan hadir melalui pemikiran yang rasional. Kesempatan untuk berkontribusi untuk meraih kesejahteraan sudah terbuka, sehingga pertimbangan material sudah dapat lebih didominasi dibandingkan pertimbangan normatif. Dengan semakin memperkuat anggapan bahwa, teori kepatuhan memang merupakan proses yang dibuat, bukan secara otomatis (Peat, Fikfak, & van der Zee, 2022).

Konotasi ini tentu tidak buruk, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, perlu adanya sebuah hal yang dikorbankan, yaitu pertimbangan normatif. Pertimbangan material ini pun bukan semata-mata hanya untuk internal keluarga WMWs, namun pembangunan secara nasional. Namun, menyadari bahwa migrasi dan remitansi memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan, mereka juga menghadirkan tantangan baru. Mengadopsi pendekatan yang tanggap terhadap gender untuk mengarusutamakan migrasi ke dalam perencanaan pembangunan dapat menjelaskan tantangan-tantangan tersebut dengan lebih baik sambil memastikan bahwa pembangunan yang dicapai adalah adil, berkelanjutan dan berorientasi menyeluruh.

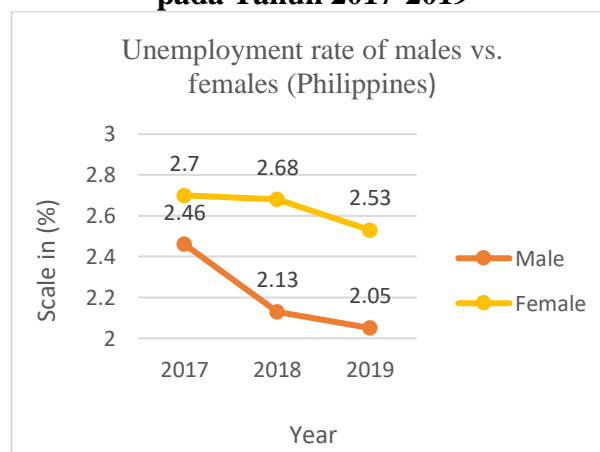
Karena bagaimanapun juga, untuk situasi saat ini dalam pemahaman pluralisme menurut Keohane dan Nye, negara bukan satu-satunya aktor rasional yang dapat dikaji secara analitis. Sebaliknya, kaum pluralis berpendapat bahwa berbagai aktor non-negara menjadi sebuah aktor yang sifatnya *borderless*, artinya aktor non-negara sangat fleksibel untuk pemenuhan *national interest* suatu negara, dalam kasus ini ialah WMWs itu sendiri (Dunne, Kurki, & Smith, 2021). Penekanan dalam perspektif ini juga berkaitan dengan karakteristik hubungan ekonomi internasional yang secara mendalam saling terhubung dalam peran-peran aktor non-negara. Meski individu sebenarnya mengejar kepentingan sendiri (*self-interested*), secara kolektif jenis perilaku seperti ini dianggap memberikan hasil-hasil yang menguntungkan.

Kesinambungan SDG 8 dengan Legal Framework Terkait Hak dan Perlindungan Migrasi untuk WMWs

Dalam lingkungannya, SDG 8 memang terkait erat dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya hak untuk bekerja dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Hal-hal yang sifatnya kontradiktif terkait dengan larangan perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan orang merupakan beberapa hal yang turut dikaji dalam poin ini. Selain itu, dalam kompleksitas *equality*, persamaan hak perempuan dalam kaitannya dengan pekerjaan, pelarangan pekerja anak dan kesetaraan hak pekerja migran juga merupakan hal-hal yang diperjuangkan dalam SDG 8, yang mana akan didasarkan di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Kedutaan Besar Filipina di Indonesia melalui Mr. Bryan Lou mengenai *output* SDG 8 pada tiga periode yang dibahas, pada target 8.5 (pemerataan upah berdasarkan tingkat pengangguran, menurut jenis kelamin, usia dan penyandang disabilitas), PBB berharap pada tahun 2030, tujuan ini dapat mencapai pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Berikut data yang ditemukan sesuai dengan indikator 8.5.2.

Grafik 1: Data Tingkat Pengangguran Laki-laki dan Perempuan di Filipina pada Tahun 2017-2019



Sumber: (Ritchie, Roser, Mispy, & Ortiz-Ospina, 2020)

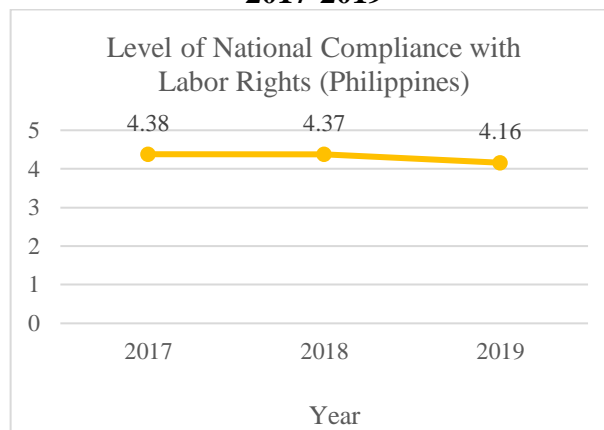
Berdasarkan data di atas, jika melihat tingkat pengangguran sesuai dengan gender, dapat dipahami bahwa walaupun setiap tahun (selama tiga tahun periode) tingkat pengangguran, baik laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, selisih perbandingan tingkat pengangguran untuk perempuan masih cukup tinggi, bahkan data terendah tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2019 belum mencapai data tertinggi tingkat pengangguran laki-laki pada tahun 2017.

Faktor utama yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut adalah bahwa laki-laki masih menjadi pemberi nafkah utama dalam keluarga, sehingga tingkat pengangguran pun terus lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Sejalan dengan interseksionalitas bahwa walaupun perempuan memutuskan untuk bekerja, mereka tetap harus memikul peran ganda terhadap pekerjaan domestiknya, untuk

itu feminisme pasar hadir bahwa pemberdayaan perempuan ini harus menganut pemikiran yang rasional, dengan memunculkan struktur ekonomi tanpa gender (Dunne, Kurki, & Smith, 2021). Feminisme pasar juga dapat dikatakan sebagai *counter* dari pemahaman kapitalis melalui pembuktian, bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dalam bernaung di pasar kerja.

Berikutnya, pada indikator 8.8 (memastikan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang bekerja tidak tetap), poin 8.8.2 mengkhususkan pada pembahasan tingkat kepatuhan nasional terhadap hak buruh (kebebasan berserikat dan perundingan bersama) berdasarkan sumber tekstual Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan undang-undang nasional. Sasaran dari poin tujuan ini adalah melindungi hak-hak pekerja dan promosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja pada tahun 2030. Berikut penjabaran data yang telah ditemukan.

Grafik 2: Data Tingkat Kepatuhan Nasional terhadap Hak Buruh Tahun 2017-2019



Sumber: (Ritchie, Roser, Mispy, & Ortiz-Ospina, 2020)

Indikator memiliki rentang dari 0 hingga 10, dengan 0 sebagai skor terbaik. Dari data yang tertera, dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan terhadap hak buruh yang dilakukan oleh Filipina semakin tahun semakin baik, bahkan nilai tertinggi (4,38) tidak lebih dari (5,0), yang mengindikasikan bahwa Filipina memperhatikan hak buruh secara dinamis sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pekerja migran dalam membantu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang dilakukan oleh Filipina. Namun ini hanya menjadi salah satu indikator terhadap keberhasilan SDG 8.8, masih banyak aspek yang masih harus ditingkatkan, terutama eksploitasi pekerja migran perempuan.

Perlu diingat, untuk melihat keefektifan SDG 8 di Filipina, peneliti juga harus mengkaji seberapa jauh undang-undang nasional ataupun internasional terkait pekerja migran, lebih khusus pekerja migran perempuan, diterapkan secara maksimal. Karena bagaimanapun juga, SDG 8 merupakan agenda pembangunan penguat dari undang-undang dan peraturan yang ada di Filipina, melihat sifat hukum nasional yang memang paling kuat dibandingkan agenda manapun. Oleh karena itu, berikut peneliti menjabarkan perkembangan undang-undang yang

mengkaji mengenai perempuan di Filipina, serta lebih khusus menjelaskan lebih rinci keadaan ini berdasarkan C189, CEDAW, dan juga ICMW.

Yang pertama, Filipina adalah negara kedua yang meratifikasi C189 dan saat ini satu-satunya negara di Asia yang meratifikasinya. Dapat dikatakan bahwa ratifikasi C189 dan undang-undang nasional yang baru, menjadikan Filipina berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengejar syarat dan ketentuan kerja dalam pekerjaan rumah tangga di luar negeri (Asuncion, 2014).

Selanjutnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) juga menjadi satu-satunya instrumen hukum internasional yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak sosial-ekonomi, sipil, dan politik perempuan, baik di ranah publik maupun privat. Sesuai dengan kewajiban Negara Pihak, Filipina telah menyerahkan enam laporan negara kepada Komite CEDAW mengenai pelaksanaan konvensi. Namun, Komite menyatakan keprihatinannya mengenai eksploitasi yang terus meluas terhadap WMWs di luar negeri (Henn, 2019). Filipina dirasa harus memperkuat regulasi dan pengawasan agen perekrutan untuk pekerja migran, serta memberikan dukungan responsif gender kepada migran perempuan yang kembali untuk reintegrasi mereka sejalan dengan SDG poin 8.8.

Dan terakhir *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (ICMW) merupakan konvensi dengan menetapkan standar minimum sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia yang sekelompok orang yang sangat rentan, termasuk pekerja migran dan anggota keluarga mereka, dengan tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan, dan status tempat tinggal mereka (Henderson, 2022, p. 29). Filipina adalah negara Asia pertama yang meratifikasi ICMW pada 1995. Masyarakat sipil Filipina memainkan peran aktif dalam ratifikasi ICMW melalui partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan dalam *position paper*, sehingga seharusnya apabila konvensi internasional dapat dijalankan dengan baik sejalan dengan UU nasional, besar kemungkinan kerentanan WMWs dapat teratasi.

Kendala dalam SDG 8 juga terlihat dalam kasus-kasus di mana Sarana Pelaksanaan (MOI) tidak jelas dan terbuka untuk dimanipulasi (Rai, Brown, & Ruwanpura, 2019). Secara keseluruhan, SDGs tetap rentan terhadap banyak perangkat yang sama dari rezim tata kelola global sebelumnya. Karena sekali lagi, semua tergantung terhadap kebijakan dan peraturan nasional di Filipina.

Peran Pemerintah Filipina dalam Melakukan Hubungan Timbal Balik

Terdapat empat lembaga pemerintah yang menangani mengenai migrasi internasional di Filipina (Henderson, 2022, pp. 52-53). Yang pertama adalah POEA yang merupakan badan utama pemerintah untuk migrasi dengan dua fungsi utama, yaitu promosi pekerjaan luar negeri bagi pekerja migran Filipina dan perlindungan biaya hak pekerja migran kepada agen perekrutan. Kemudian terdapat OWWA dengan tugas memberikan layanan kesejahteraan dan tunjangan bagi pekerja migran serta keluarganya. OWWA menawarkan layanan termasuk asuransi kesehatan dan pendidikan. OWWA juga bertugas dalam layanan sosial dan layanan pengiriman uang bagi WMWs. Berikutnya POLO yang merupakan lembaga advokasi dan konsultasi untuk WMWs di negara penerima. POLO juga membantu WMWs dalam menangani kasus pidana yang mereka alami selama bekerja. Dan

terakhir adalah NRCO yang merupakan lembaga yang menangani tentang permasalahan pemberdayaan kewirausahaan pekerja migran, melalui perencanaan investasi, bisnis, atau pekerjaan lokal sekembalinya mereka ke negara asal.

Pemerintah juga memberikan program pendidikan dan sosialisasi terhadap WMWs (Henderson, 2022, pp. 109-114). Yang pertama adalah Seminar Orientasi Pra-Kerja di Filipina adalah program pendidikan berbasis komputer wajib yang disediakan oleh POEA. Seminar untuk pekerja rumah tangga migran Filipina mencakup topik-topik, seperti bagaimana menghindari perekrutan ilegal, pendokumenan, kontrak kerja dan biaya yang diperlukan untuk melamar pekerjaan di luar negeri.

Setelah menyelesaikan seminar pra-kerja, Pemerintah Filipina mewajibkan pekerja migran yang berangkat untuk mengikuti Seminar Orientasi Pra-Keberangkatan (PDOS) yang diselenggarakan oleh OWWA. Setelah membayar biaya keanggotaan seperti yang sudah dijelaskan di atas, pekerja rumah tangga memiliki program mereka sendiri di bawah OWWA, berjudul Program Pendidikan Pra-Keberangkatan Komprehensif. Program ini merupakan seminar empat atau enam hari yang diselenggarakan bersama oleh penyedia LSM terakreditasi dan OWWA.

Kemudian, pemerintah Filipina menawarkan lapisan lain dalam perlindungan hukum bagi pekerja migran dalam bentuk Seminar Orientasi Pasca-Kedatangan (PAOS). PAOS ditawarkan setelah pekerja tiba di negara tujuan dan dilakukan oleh atase tenaga kerja di POLO, serta oleh LSM yang terakreditasi. PAOS dimaksudkan untuk memberi para migran informasi terkini dan lebih komprehensif tentang tempat tinggal dan pekerjaan baru mereka, termasuk undang-undang dan peraturan, budaya, norma, praktik, dan bahasa negara yang akan mereka tempati. Namun berbeda dengan PDOS, PAOS sifatnya tidak wajib, akan tetapi tetap penting untuk WMWs dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja baru mereka.

Dan terakhir dalam proses ini, reintegrasi pekerja migran Filipina yang diberdayakan oleh OWWA dan NRCO. Melalui kontribusi \$25, terdapat program persiapan untuk proyek mata pencaharian, pelatihan keterampilan, dan pinjaman kredit, yaitu disebut dengan *Balik-Pinay! Balik-Hanapbuhay!* (Henderson, 2022, p. 54). Untuk WMWs sendiri, biasanya ditawarkan pekerjaan, seperti pembukaan salon ataupun bisnis menjahit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ibu Anis Hidayah (*Migrant CARE Indonesia*), peran lain yang dilakukan Pemerintah Filipina dalam menghormati perjuangan WMWs ialah dengan memberikan perayaan besar setiap tahunnya pada Hari Buruh di ruang publik. Kemudian, dalam program migrasi kembali, Pemerintah Filipina mengadakan *Model Overseas Filipina Worker Family of the Year Awards* setiap tahunnya, untuk menghormati keluarga yang menunjukkan pencapaian luar biasa dalam kewirausahaan dan pengembangan usaha (Go, 2012).

Tantangan dalam Proses Migrasi Perempuan

Setelah melakukan pembahasan yang cukup kompleks di atas, peneliti membuat beberapa poin terakhir mengenai tantangan-tantangan apa saja yang menghambat proses migrasi WMWs, baik secara internal ataupun eksternal. **Yang pertama adalah hambatan implementasi instrumen hukum internasional.**

Konvensi internasional yang mempromosikan kesetaraan formal antara perempuan dan laki-laki, tidak dapat secara memadai mengatasi tekanan struktural yang mengakar dan ketidaksetaraan yang menempatkan pekerja rumah tangga perempuan dalam posisi rentan dalam pasar tenaga kerja global. Bahkan dapat dikatakan bahwa filosofi neoliberal melemahkan CEDAW dengan menciptakan kondisi pasar yang membuat kesempatan setara bagi perempuan di pasar ekonomi dan tenaga kerja, tetapi tidak dapat dicapai dalam praktiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa, solusi terbaik melalui pembuatan undang-undang yang ramah gender pun, belum dapat menyelesaikan semua kasus kesenjangan migrasi WMWs, karena itu semua berhubungan dengan kondisi sosial dan kebijakan nasional Filipina dalam menanggapi hal tersebut.

Yang kedua norma gender yang berlaku. Warisan Katolik Spanyol menanamkan konsep bahwa perempuan berada di bawah laki-laki yang memiliki pangkat dan status yang lebih tinggi hingga saat ini. Filipina sendiri merupakan negara mayoritas Katolik Roma di Asia, dengan lebih dari 92 juta penganut pada 2010 atau lebih dari 86% dari populasi (Bonifacio, 2018). Sehingga kondisi ibu migran yang bekerja, masih mendapatkan stigma negatif. Stigma mengenai rasa bersalah masih melingkupi WMWs di Filipina, baik dari keluarga mereka sendiri ataupun masyarakat setempat sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab.

Yang ketiga terjadinya larangan migrasi WMWs. Pemerintah telah berulang kali memberlakukan larangan khusus negara terhadap migrasi pekerja rumah tangga perempuan sebagai tanggapan atas meningkatnya keluhan eksploitasi. Larangan tersebut memberi perekrut dan majikan lebih banyak kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari posisi pekerja yang tidak berdokumen mengingat kurangnya pengawasan pemerintah. Hal itu cukup kontradiktif, karena walaupun kondisi perempuan dapat dikatakan terselamatkan dari eksploitasi dalam bekerja di luar negeri, namun pemerintah Filipina belum memberikan agenda untuk menggantikan langkah WMWs dalam mencari kesejahteraan di lingkungan domestik, pemerintah belum menyiapkan lapangan kerja tersebut.

Yang keempat biaya perekrutan ilegal dan berlebihan. Tidak seperti pekerja migran terampil, pekerja rumah tangga Filipina berketerampilan rendah tidak diizinkan untuk mencari pekerjaan melalui perekrutan langsung dan harus melalui salah satu agen perekrutan swasta yang dilisensikan oleh POEA untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Namun dalam beberapa kasus, agen perekrutan membebankan biaya berlebihan yang disamakan sebagai pembayaran untuk pelatihan keterampilan, tiket pesawat, atau pemrosesan paspor. Ketika pekerja rumah tangga migran tidak mampu membayar jumlah penuh, sisanya dikumpulkan melalui pemotongan gaji atau pekerja dipaksa untuk mengambil pinjaman bunga tinggi dari bank atau rentenir swasta. Sehingga mereka secara nyata terus dieksploitasi oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut (Farbenblum, 2017).

Yang kelima kurangnya pelatihan dan pengetahuan personil pemerintah yang terbatas di luar negeri. Para advokat di *Center for Migrant Advocacy* di Filipina mengkonfirmasi betapa jumlah atase tenaga kerja Filipina di luar negeri tidak memadai. Pada Maret 2018, Wakil Administrator OWWA, memanggil 500 personel lagi setelah mengakui bahwa pada saat itu hanya ada 120 pejabat dari OWWA yang ditempatkan di luar Filipina. Bahkan diperkirakan hanya ada satu

petugas kesejahteraan yang ditugaskan untuk setiap 20.000 pekerja Filipina di luar negeri (Ambito & Banzon, 2011). Atase ketenagakerjaan tidak dilengkapi dengan pelatihan yang layak oleh pemerintah dan kurangnya pengetahuan tentang proses di negara tuan rumah. Sehingga eksekusi mereka dalam membantu menangani permasalahan WMWs tidak berjalan secara maksimal.

Yang keenam minimnya informasi dalam proses sebelum dan sesudah kepulangan migrasi. Advokat di Filipina menyebutkan bagaimana penyelenggara PDOS sering mempersingkat sesi dan banyak pekerja gagal menghadiri seluruh kursus, jadi informasi tidak terserap secara maksimal. Isi kursus dalam praktiknya juga seringkali berbeda dengan apa yang diwajibkan oleh undang-undang. Kemudian, *database* migran yang kembali juga masih cukup kacau dengan tidak adanya integrasi antara lembaga terkait. Proyek pelatihan mata pencaharian untuk pekerja migran perempuan yang kembali di Filipina pun belum efektif, karena mata pencaharian yang ditargetkan, seperti industri kecantikan, membutuhkan modal yang cukup besar. Selain itu, tidak semua migran yang kembali tertarik untuk menjadi pengusaha (Spitzer & Piper, 2014).

KESIMPULAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama bahwa pengiriman uang ke Filipina mencapai rekor tertinggi sebesar US\$35,2 miliar pada tahun 2019, dengan menyumbang hampir 10% dari produk domestik bruto (PDB) dan memperkuat Filipina sebagai penerima remitansi terbesar keempat di dunia. Prioritas ekonomi berorientasi ekspor ini juga terlihat dari cara pemerintah terus memasarkan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Pengiriman uang yang dihasilkan dari pekerjaan di luar negeri telah menjadi ciri khas pembangunan ekonomi Filipina.

Namun berdasarkan data yang ditemukan, mayoritas pekerjaan WMWs masih pada pekerjaan level rendah, yangmana masih menjadikan mereka rentan terhadap penyimpangan dan juga upah yang tidak sepadan. Sehingga, pada akhirnya, untuk menciptakan tata kelola migrasi tenaga kerja yang adil gender yang mendukung pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender itu sendiri harus ditangani, baik di negara pengirim maupun penerima.

Dengan melihat pekerja migran perempuan melalui lensa SDG 8, peneliti menemukan bahwa *goals* agenda tersebut tidak mengatasi ketegangan struktural yang lebih dalam mendorong migrasi feminis, tenaga kerja feminis, atau norma gender. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa tujuan utama SDG 8 tidak akan tercapai kecuali ketegangan struktural tersebut dapat diatasi oleh masyarakat terkait.

Sesuai dengan fokus penelitian, peninjauan SDG 8 sekiranya belum dapat dilihat secara maksimal untuk direalisasikan. Dua faktor utamanya adalah, SDGs merupakan agenda jangka panjang dan juga SDGs tidak lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan hukum nasional Filipina, sehingga berbagai rancangan target pun belum tentu dapat terlaksana secara maksimal. Yang utama, Filipina beserta masyarakatnya sendiri yang dapat memperjuangkan situasi migrasi yang sensitif gender melalui langkah yang kooperatif.

Kebijakan nasional yang sudah mereka buat secara baik, harus terealisasi dengan optimal, terlebih Filipina juga merupakan salah satu negara yang secara

aktif melakukan ratifikasi terhadap UU internasional terkait migran dan perempuan, bahkan disebut sebagai salah satu negara pelopor HAM dan kesetaraan gender, sehingga *output* yang dihasilkan dalam hal hak dan perlindungan harus selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain yang tidak mengoptimalkan hal tersebut, terutama dalam region Asia Tenggara.

Peneliti berharap agar penelitian mengenai SDG 8 untuk terus dikaji di Filipina sampai dengan batas akhir agenda tersebut, agar data yang diperoleh dapat tergambar secara maksimal. Peneliti juga berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, karena kasus *soft level* seperti perempuan, masih sangat terbatas untuk disuarakan.

CONFLICT OF INTEREST

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi artikel ini, peneliti melaporkan tidak adanya potensi konflik kepentingan dari pihak manapun.

ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian ini berjalan dengan lancar, baik untuk dosen-dosen HI FISIP UPNVJ, informan-informan dalam penelitian ini, dan juga rekan-rekan peneliti yang telah bersedia bertukar pikiran, serta memberikan kritik yang membangun untuk terus memperkaya wawasan dalam tulisan ini.

REFERENSI

- Agu, C., Orji, A., & Onodugo, V. (2017). Migration motivation, migrant characteristics and migration outcomes in Nigeria: Evidence from survey data. *International Journal of Economic Research*, 14(3).
- Ambito, J. S., & Banzon, M. S. (2011). *Review of Philippine Migration Laws and Regulations: Gains, Gaps, Prospects*. Makati City: Philippine Institute for Development Studies.
- Asuncion, R. A. (2014). The Domestic Workers Act of the Philippines: Issues, Challenges and Concerns. *Labour & Industry*, 24(4), 317-330.
- Bonifacio, G. T. (2018). Religion and gender equality in Catholic Philippines: Discourses and practices in the 21st century. *Women and religion: Contemporary and future challenges in the global era*, 41-57.
- Bradshaw, S., Chant, S., & Linneker, B. (2017). Gender and poverty: what we know, don't know, and need to know for Agenda 2030. *Gender, Place & Culture*, 24(12), 1667-1688.
- Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social Research Methods*. Canada: Oxford University Press.
- Cabegin, E. C., & Gaddi, R. S. (2019). *Determinants of female labor force participation in the Philippines*. Pasig City: NEDA Philippines.
- Cortes, P. (2015). The feminization of international migration and its effects on the children left behind: Evidence from the Philippines. *World Development*, 65, 62-78.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (. (2021). *International relations theories: discipline and diversity*. USA: Oxford University Press.

- Encinas-Franco, J. (2016). Filipino Women Migrant Workers and Overseas Employment Policy: An Analysis from Women's Rights Perspective. *Asian Politics and Policy*, 8(3), 494–501.
- Encinas-Franco, J. (2020). Gendered Constructions of Overseas Filipino Workers and the Politics of National Shame. *Journal of Human Rights and Peace Studies*, 6(2), 283-310.
- Farbenblum, B. (2017). Governance of Migrant Worker Recruitment: A Rights-Based Framework for Countries of Origin. *Asian Journal of International Law*, 7(1), 152–184.
- Gammage, S., & Stevanovic, N. (2018). Gender, migration and care deficits: what role for the sustainable development goals? *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Go, S. P. (2012). *The Philippines and Return Migration: Rapid Appraisal of the Return and Reintegration Policies and Service Delivery*. Manila: ILO.
- Hega, M. D., Alporha, V. C., & Evangelista, M. S. (2017). Feminism and the Women's Movement in the Philippines. *Friedrich Eberto Stiftung*.
- Henderson, S. (2022). *Protecting the Rights of Women Migrant Domestic Workers: Structural Violence and Competing Interests in the Philippines and Sri Lanka*. New York: Routledge.
- Henn, E. V. (2019). *International Human Rights Law and Structural Discrimination: The Example of Violence against Women*. Berlin: Springer.
- Hennebry, J., Holliday, J., & Moniruzzaman, M. (2017). *At what cost? Women migrant workers, remittances and development*. New York: UN Women.
- Mohyuddin, S. I. (2017). Female Migrant Labor in the Philippines: The Institutionalization of Traditional Gender Roles in the Name of Economic Development. *Pursuit-The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee*, 8(1).
- Nadeau, K. (2008). *The history of the Philippines*. London: Greenwood Press.
- NEDA PH. (2020). *Part VII Protecting The Rights, Promoting The Welfare, and Expanding Opportunities for Overseas Filipinos*. Manila: Philippine Development Plan.
- Pacoy, E. P. (2013). Reducing Gender Gaps Through Gender-Responsive Budgeting in Davao City, Philippines. *Millennium Development Goals and Community Initiatives in the Asia Pacific*, 97-106.
- Peat, D., Fikfak, V., & van der Zee, E. (2022). Behavioural Compliance Theory. *Journal of International Dispute Settlement*, 13(2), 167-178.
- PSA. (2021). *Overseas Filipino Workers Profile*. Quezon City: Philippine Statistics Authority.
- Rai, S. M., Brown, B. D., & Ruwanpura, K. N. (2019). SDG 8: Decent work and economic growth—A gendered analysis. *World Development*, 113, 368-380.
- Reyes, C. M., Albert, J. R., Tabuga, A. D., Arboneda, A. A., Vizmanos, J. F., & Cabaero, C. C. (2019). The Philippines' Voluntary National Review on the Sustainable Development Goals. *PHILIPPINE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT STUDIES*.
- Ritchie, Roser, Mispy, & Ortiz-Ospina. (2020). *Measuring progress towards the Sustainable Development Goals*. Retrieved from [SDG-Tracker.org: https://sdg-tracker.org/economic-growth#8.5](https://sdg-tracker.org/economic-growth#8.5)

- San Juan, D. M., & Agustin, P. J. (2019). Poverty, Inequality, and Development in the Philippines: Official Statistics and Selected Life Stories. *European Journal of Sustainable Development*, 8(1).
- Spitzer, D. L., & Piper, N. (2014). Retrenched and Returned: Filipino Migrant Workers During Times of Crisis. *Sociology*, 48(5), 1007–1023.
- Tanyag, M. (2017). Invisible labor, invisible bodies: How the global political economy affects reproductive freedom in the Philippines. *International Feminist Journal of Politics*, 19(1), 39-54.
- Thompson, M. R., & Batalla, E. V. (2018). *Routledge Handbook of The Contemporary PHilippines*. New York: Routledge.
- Tigno, J. V. (2014). At the Mercy of the market?: State-enabled, marketoriented labor migration and women migrants from the Philippines. *Philippine Political Science*, 35(1), 19-36.
- UN WOMEN (a). (2017). *Women Migrant Workers' Contributions to Development*. Retrieved from UNWomen.org: Policy Brief No. 2: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/7/women-migrant-workers-contributions-to-development>
- UN WOMEN (c). (2017). *Mis/representations of women migrant workers in the media: A critical analysis*. Retrieved from United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women): <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/7/mis-representations-of-women-migrant-workers-in-the-media>.
- United Nations. (2019). *The 2019 Voluntary National Review of the Philippines*. Retrieved from United Nations Web site: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23366Voluntary_National_Review_2019_Philippines.pdf
- World Bank. (2020). *COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. Migration and Development Brief 32*. Washington DC: World Bank Group.